

**ANALISIS *CASH RATIO*, *LOAN TO DEPOSIT*, DAN *LOAN TO ASSET RATIO* UNTUK MENGUKUR TINGKAT LIKUIDITAS ANTARA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Syarat-syarat Guna Memenuhi
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

SATRIYA YUWANA

NIM. B 100 060 032

**FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. (*Ikhtisar Perbankan, www.BI.go.id*).

Kegiatan perbankan di antaranya memberikan kredit dan jasa, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dengan di berikan nya kredit pada beberapa faktor perekonomian, bank melancarkan arus barang-barang dan jasa dari produsen ke

konsumen. Selain itu bank merupakan pemasok dari sebagian besar uang yang beredar, yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan dengan baik.

Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami kemunduran akibat krisis moneter yang melanda pertengahan 1997. Penyebab dari krisis moneter tersebut merupakan proses integrasi perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global yang berlangsung dengan cepat. Faktor lain juga berperan adalah kelemahan fundamental, mikroekonomi yang tercermin kerentangan sektor keuangan nasional, khususnya sektor perbankan. Hal ini mengakibatkan adanya sistem pengawasan yang kurang efektif dari bank sentral karena belum dapat mengimbangi pesat dan kompleksnya kegiatan operasional perbankan, relatif lemahnya kemampuan manajerial bank telah mengakibatkan penurunan kualitas asset produktif peningkatan resiko yang di hadapi oleh bank, dan juga kurang transparasinya informasi mengenai kondisi perbankan. Kondisi tersebut mengakibatkan pula kesulitan dalam melakukan analisis secara akurat tentang kondisi keuangan suatu bank, melemahnya upaya untuk melakukan kontrol sosial dan menciptakan disiplin pasar. Kegagalan keuangan yang juga merupakan dampak dari kegagalan ekonomi membuat bank tidak mampu membayar kewajiban *finansialnya* pada saat jatuh tempo. Kondisi tersebut membuat banyak bank tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya tanpa diketahui lebih awal.

Suatu bank dapat dikatakan likuid, jika bank yang bersangkutan dapat membayar semua hutangnya terutama utang-utang jangka pendek. Hutang jangka

pendek merupakan simpanan masyarakat yang berupa tabungan, giro, dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar, kemudian bank harus dapat memenuhi semua permintaan kredit yang harus dipenuhi. Likuiditas suatu bank mempunyai peranan penting dalam pengelolaan perbankan. Sistem penilaian kesehatan bank di Indonesia dapat diukur dengan menggunakan metode CAMEL yaitu metode yang terdiri dari modal (*capital*), aktiva (*asset*), manajemen (*management*), profitabilitas (*earning*), dan likuiditas (*liquidity*). (*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 5, No.2, September 2006*).

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian terhadap upaya umat manusia dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam memecahkan masalah tersebut manusia harus mengikuti aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang merupakan informasi dan prinsip yang sudah jelas kehalalan, kebebasan usaha, keadilan dan tata kramanya. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul bersifat universal dan abadi. Namun secara operasional banyak aturan yang masih perlu ditafsirkan terutama berkenaan dengan kepentingan pada waktu dan usaha tersebut dilaksanakan. Penafsiran muncul dalam konteks demikian, pemaparan ekonomi islam tidak diawali dengan mendiskusikan isi Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tetapi pandangan-pandangan yang mengekspresikan dari para cendekiawan muslim umat menjadi bingung dan salah dalam menyikapi persoalan ekonomi.

Dari gambaran tersebut, pemikiran-pemikiran ekonomi islam perlu dikembangkan secara berkesinambungan dan ditindaklanjuti dengan pendirian lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah untuk memberikan ruang

gerak bagi umat islam dalam merealisasikan keyakinanya. Berkembangnya ekonomi kapitalis termasuk lembaga ekonominya sempat menggoncangkan pikiran umat manusia sehingga kesadaran para cendikiawan muslim untuk mengembangkan ekonomi islam sebagai solusi dalam memecahkan masalah ekonomi sedikit tertunda. (*Jurnal Ilmu Ekonomi & Pembangunan (JIEP) Vol 7, No. 1, 2007*).

Selain itu, adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan yang belum bisa terselesaikan sepenuhnya oleh bangsa Indonesia. apalagi ditambah adanya krisis global yang muncul di tengah-tengah krisis ekonomi, maka dari itu ini adalah masalah perekonomian yang sangat serius yang sedang di hadapi bangsa Indonesia. Adanya permasalahan perekonomian ini, pihak perusahaan perbankan yang ada, harus benar-benar bisa mempertahankan diri supaya bisa tetap eksis dan membantu perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Salah satunya, semua perbankan harus bisa menjaga dan mempertahankan arus kas yang ada di dalam laporan keuangan dan juga menjaga kualitas semua asset-asset yang dimiliki, terutama masalah pendanaan dan pemberian kredit kepada masyarakat. Intinya perbankan di tuntutan agar pendanaan atau arus kas dananya tetap likuid.

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan "*Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*". Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi

aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (*API*) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (*ASKI*) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (*Islamic Financial Services Board*), *AAOIFI* dan *IIFM*.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (*API*), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (*ASKI*), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (*RPJMN*) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (*RPJPN*). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran

perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang

memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank. (*Sekilas Perbankan Syariah, Kebijakan Pengembangan Syariah di Indonesia, www.BI.go.id*)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS CASH RATIO, LOAN TO DEPOSIT, DAN LOAN TO ASSET RATIO UNTUK MENGUKUR TINGKAT LIKUIDITAS ANTARA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan yang tertulis diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah terdapat perbedaan tingkat likuiditas yang terjadi antara perbankan syariah dan konvensional periode waktu 31 Maret tahun 2009 yang diukur dengan menggunakan analisis *cash ratio, loan to deposit, dan loan to asset ratio?*”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat likuiditas antara perbankan syariah dan konvensional periode waktu 31 Maret 2009.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang mempengaruhi kinerja perbankan di masa yang akan datang.

2. Bagi Masyarakat Pengguna Jasa Bank

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk membantu menetapkan pilihannya (dalam hubungannya dengan penggunaan jasa perbankan dan pengelolaan dana).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

E. Sistematika Skripsi

Untuk sedikit memperoleh sedikit gambaran permulaan terhadap hasil skripsi ini maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi pengertian perbankan, sejarah perbankan, perbedaan perbankan syariah dan konvensional, fungsi dan peranan perbankan, penilaian kesehatan dan likuiditas perbankan.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi kerangka pemikiran, definisi operasional dan variable, review penelitian terdahulu, hipotesis, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis penilaian likuiditas perbankan syariah dan konvensional dengan metode *Cash Ratio*, *Loan to Deposit*, dan *Loan to Asset Ratio* serta hasil analisis data mengenai perbedaan tingkat likuiditas perbankan syariah dan konvensional.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan materi pembahasan pada penelitian ini.